



KLIPING PERPUSTAKAAN DPR-RI

http://kliping.dpr.go.id

Judul : Desak Cabut Izin Lion Air
Tanggal : Rabu, 31 Oktober 2018
Surat Kabar : Indo Pos
Halaman : 7

Desak Cabut Izin Lion Air

■ Sambungan dari halaman 1

Dalam sesi tanya-jawab, sejumlah anggota Dewan bertanya soal jatuhnya pesawat Lion Air JT 610. Salah satunya, Wakil Ketua Komisi V DPR Anton Sukartono Suratto. "Saya langsung ke Dirjen Perhubungan Udara saja, mengenai kecelakaan JT 610, saya mau nanya SOP-nya (Standart Operasional Prosedur) itu gimana? Ini kan masalah teknis sekali. Apakah sudah tidak layak terbang atau tidak?" tandaunya.

Anton menilai penerbangan Lion Air JT 610 itu janggal. Sebab, dia tahu pesawat sempat mengalami gangguan. "Semestinya audit akan terlihat aspek yang perlu diperbaiki, sehingga maskapai benar-benar mengadakan mendapatkan izin terbang," ujarnya.

"Pemerintah harus tetgas kalau nantinya menemukan sejumlah pelanggaran setelah audit dilakukan," katanya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Pt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub M. Pramiantoro

Sukarno menegaskan bahwa

pesawat Lion Air JT 610 saat itu

dirilis layak terbang. Namun

penjelasan lebih lanjut menge-

nai itu akan disampaikan lewat

keterangan tertulis. "Kemudian

khusus untuk satu pertanyaan

terkait terkait 737 Max (pe-

salah, maka sesuai peraturan yang berlaku maskapai ini bisa dicabut izinnya. "Berdasarkan perairan sanksi paling parah adalah pencabutan izin, karena ini meresahkan bangsa," tandaunya.

Diamini Ketua Komisi V DPR RI Fary Jemni Francis. "Kami minta pemerintah dalam memberikan jaminan kelaikan udara, termasuk memperketat pembebasan flight approval (persepsi terbang, Red) dan melakukkan ujian keselamatan terhadap maskapai serta dilakukan audit saja. Kalau tidak layak ya silakan dipertimbangkan," katanya.

Fary mengatakan, dengan adanya audit akan terlihat aspek yang perlu diperbaiki, sehingga maskapai benar-benar mengadakan mendapatkan izin terbang. "Pemerintah harus tetgas kalau nantinya menemukan sejumlah pelanggaran setelah audit dilakukan," katanya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Pt Dirjen Perhubungan Udara Kemenhub M. Pramiantoro

Sukarno menegaskan bahwa

pesawat Lion Air JT 610 saat itu

dirilis layak terbang. Namun

penjelasan lebih lanjut menge-

nai itu akan disampaikan lewat

keterangan tertulis. "Kemudian

khusus untuk satu pertanyaan

terkait terkait 737 Max (pe-

sawat Boeing 737 Max 8, Red)

sebenarnya sudah ada pesawat dengan kondisi layak terbang. Diposisikan dari Bali ada beberapa indikator yang mengalami gangguan dan sudah diperbaiki oleh engineer, dilakukan perbaikan dan dinyatakan layak terbang oleh engineer dan diperbaiki oleh expert juga dalam posisi rilis," ujarnya.

"Penjelasan lengkap atas keputusan dari KNKT terkait tinggal fokus yang berada di dalam lait," terangnya.

Penyisiran di permukaan laut menemukan sekitar puluhan kantong jenazah. Nantinya, semua jenazah itu akan didentifikasi. "Untuk yang di dalam laut ini, kami menggunakan dua cara. Per-

atakan scanning menggunakan alat Multi Beam EchoSounder

dan penyetelan. Kami tetap bu-

tuh orang di bawah," tuturnya.

Hingga saat ini proses scan-

ing masih dilakukan, target utamanya untuk menemukan

bodi utama pesawat. Tidak

diketahui jatuhnya pesawat telah

diketahui, namun bodi utama

pesawat masih ditemukan. "Nanti

kalau sudah ditentukan, pasti

kami update," paparnya di Rumah Sakit (RS) Polri Kra-

mat Jati.

Di samping banyaknya korban

yang belum ditemukan karena kemungkinan berada

di dalam bodi utama pesawat.

"Kekurangan mestinya di dalam

pesawat," ujarnya sembari me-

nyebut optimistik bodi utama

pesawat masih ditemukan.

Apakah Basarnas memprediksi

lokasi bodi utama pesawat? Dil-

menurutnya bahwa arus laut

mengarah ke Selat dan Barat

Daya. Itulah yang menjadi ala-

man yang selama ini

dicari Basarnas membuka

posko di Tanjung Karawang,

"Harapannya selain petugas,

relyan-relyan bisa melaporkan

kalau menemukan sesuatu. Kalau

laporinya di Tanjung Priok

terlalu jauh," ujarnya.

Sesuai undang-undang, pen-

carian korban kecelakaan pe-

sawat bisa dilakukan selama

tujuh hari. Namun, bila ada

indikasi bisa ditemukan akan

ditambah tiga hari. "Setelah 10

hari kami analisa kembali, yang

pasti kami berupaya keras 24

jam," tegasnya.

Banyak Korban di Pesawat

Pencarian korban kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air dengan nomor penerbangan JT 610 mulai bergeser ke dasar laut. Dipastikan, jenazah

korban serta serpihan pesawat yang herda di permukaan perairan Karawang telah bersih. Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafigi menjelaskan, dengan operasi gabungan antara Basarnas, Polri, dan TNI dapat dipastikan bahwa serpihan dan bagian tubuh korban yang berada di permukaan perairan Karawang telah berhasil dievakuasi. "Itu artinya, tinggal fokus yang berada di dalam lait," terangnya.

Kepala Polri Kombespol Musyafak menuturkan, dalam proses identifikasi ini kemungkinan korban merupakan korban yang tewas dalam kecelakaan. Menteri yang juga personel Elek Yo Bandi itu mengatakan, sanksi diberikan setelah apa keselamatan yang diperlukan telah berhasil dievakuasi. "Apakah yang salah manajemen pesawatnya, kru atau SOP. Kami menunggu dari KNKT," katanya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Karena itu, lanjut dia, sejumlah sanksi harus diberlakukan jika memang ditemukan

pelanggaran setelah diaudit. "Jadi lakukan audit dulu, dan undang-undang mengatur itu. Kami harap pemerintah tegaskan dalam hal ini," tegasnya.

Sementara informasi dari Disaster Victim Identification (DVI) diketahui bahwa setidaknya ada 37 kantong jenazah yang telah dibawa ke RS Polri Kra-mat Jati hingga tadi malam (lilah grafis). Namun, bukan berarti jumlah tersebut sama dengan jumlah jenazah yang ditemukan.

Kepala Polri Kombespol Musyafak menuturkan, dalam proses identifikasi ini korban memerlukan waktu sekitar empat hingga lima hari. Namun, tetap memerlukan keluarga korban dan turut bina segera mendatangi RS Polri. "Untuk tes DNA dibutuhkan sampel, dari keluarga inti. Seperti orang tua, anak, kakak atau adik kandung," ujarnya.

Proses identifikasi terhadap jenazah korban memerlukan waktu sekitar empat hingga lima hari. Namun, tetap memerlukan keluarga korban dan turut bina segera mendatangi RS Polri. "Untuk tes DNA dibutuhkan sampel, dari keluarga inti. Seperti orang tua, anak, kakak atau adik kandung," ujarnya.

Presiden Joko Widodo (Jokowi) didampingi Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi dan Kepala Basarnas Marsekal Madya TNI Muhammad Syafigi menyerahkan wakil sekitar empat hingga lima hari. Namun, tetap memerlukan keluarga korban dan turut bina segera mendatangi RS Polri. "Untuk tes DNA dibutuhkan sampel, dari keluarga inti. Seperti orang tua, anak, kakak atau adik kandung," ujarnya.

Investigasi KNKT

Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) yang menentukan apa yang menjadi penyebab kecelakaan pesawat JT-610, Red," jelasnya.

Menurut Budi, proses inspeksi seluruh pesawat itu bukan lantas seluruhnya tidak boleh terbang. Pengoperasian tetap berjalan normal seperti biasa. Proses inspeksi hanya dilakukan untuk pemetaan atau mapping kondisi pesawat.

KNKT langsung mengirimkan notifikasi kepada negara-negara terkait, termasuk negara-pesawat, tentang insiden ini. KNKT mendapatkan penawaran bantuan dari beberapa pihak, termasuk Argentina, JIAAC (Junta de Investigación de Accidentes de Aviación Civil), Amerika Serikat NTSB (National Transportation Safety Board), Singapura TSIB (Transport Safety Investigation Bureau), Malaysia AAB (Air Accident Investigation Bureau) serta yang terbaru dari Arab Saudi.

"Mereka menawarkan alat dan SDM untuk membantu investigasi. Kami akan berkoordinasi dengan Kemenhub untuk bantuan personel dari negara lain," jelasnya. Bantuan alat dari Singapura sudah sampai di Jakarta. Sedangkan personel yang akan mengoperasikan alat tersebut iba di Indonesia Rabu (31/10) malam.

Sementara itu, mengenai pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air pada penerbangan sebelumnya dengan rute Denpasar-Jakarta, KNKT mengaku sudah meng-collect data dari operator dan penerbangan sebelumnya.

"Kami sudah dapatkan rela-

man perincian antara pilot dan airman pada penerbangan sebelumnya, kami juga sudah berupaya meminta informasi dari pilot sebelumnya. Tapi untuk saat ini belum bisa kami sampaikan karena kita harus mencocokkan apa yang terjadi di lapangan dan hasil periksa-

pan. Ini baru single data saja," terang Koordinator Air Safety Investigation KNKT Ony Soerjo Wibowo.

Disinggung mengenai pen-

gakuan salah satu penumpang penerbangan Denpasar-Jakarta dengan Boeing 737 MAX 8 serta beredar foto flight log. Ony hanya menyebut bahwa data-data dari masyarakat tetap akan di-collect untuk masukan KNKT. "Tapi itu semua tetap perlu diverifikasi. Dengan san-

gat menyelis, detilnya seperti apa belum bisa kami sampaikan. Sesuai dengan undang-

undang dan hasil investigasi masih belum bisa kami sampaikan, tetapi itu bersifat rahasia," katanya. (ae/n, idr, wan/agf/onu/dny)

Kemendikbud. R. Ridwan

menyatakan, pesawat Boeing 737 MAX 8 milik Lion Air Sampai kemarin, (30/10), KNKT mengaku masih berusaha mengumpulkan seluruh data dan menggerakkan beberapa tim investigator untuk mencari pesawat Lion Air JT-610.

Wakil Ketua KNKT Hayo Salim mengatakan, Senin malam, tim KNKT telah merapat di Kapal Baruna Jaya I milik BPPT.

"Kapal Baruna Jaya I telah sampai di lokasi jam 06.00 WIB Selasa pagi. Kami berkoordinasi dengan SAR Mission Coordinator (SMC) Badan Nasional Penericakan dan Pertolongan (BNPP), TNI dan Pertamina untuk memulai proses pencarian main wreckage," ujarnya saat konferensi pers di kantor KNKT di Jakarta, kemarin.

Pada pukul 09.30 WIB, tim KNKT dan BPPT telah menuju Rumah Sakit (RS) Polri Kra-mat Jati. "Kami mendampingi Jokowi, Menhub dan Raja mengatakan bahwa kecelakaan pesawat Boeing 737 MAX 8 yakni, delapan unit milik Lion Air dan satu lagi milik Garuda Indonesia." Kemarin (29/10), Kemendikbud sudah kirim surat untuk Lion Air dan Garuda untuk inspeksi pesawat Boeing 737 Max 8, katanya.

Budi mengatakan, pengiriman surat untuk kedua maskapai itu tidak didasari dengan praduga apapun. Murni dilakukan untuk pengecekan. Pengecekan atau inspeksi itu dilakukan oleh Direktorat Kelaikan dan Pengoperasian Pesawat Udara Kemenhub. Kemudian hasil-